

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Informasi Desa**

##### **1. Pengertian**

Sistem Informasi Desa yang pada awalnya disebut SIDESA hingga akhirnya menjadi SID memiliki dua pengertian, dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit SID dimaksudkan sebagai sebuah aplikasi yang membantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik desa guna memudahkan proses pencariannya. Sedangkan dalam arti luas, SID diartikan sebagai suatu rangkaian atau sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumberdaya yang ada di komunitas.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu program yang dirancang oleh *COMBINE Resource Institution (CRI)* (Pusat Sumber Daya bagi Jaringan Informasi Berbasis Komunitas), guna memulihkan kembali kehidupan desa. Pada mulanya SID dirancang untuk melangkapi kekurangan “Profil Desa” yang dianggap tidak rinci menampung keunikan dari data sebuah desa, program ini juga bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses pengambilan data secara bersama dan demokratis (terbuka dan melibatkan masyarakat) sekaligus mendorong terbangunnya kontrol publik yang efektif terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui pengembangan sistem informasi dan teknologi berbasis masyarakat.

Di awal praktik, program ini menghadapi beberapa kendala seperti: masih belum terbukanya warga dalam menyampaikan data, kesulitan menemui warga dan pengetahuan *enumerator-fasilitator* yang terbatas.<sup>1</sup> Namun seiring berjalannya waktu, dampak-dampak positif dari program ini mulai dirasakan, terutama oleh perangkat desa. Bagi perangkat desa, Sistem Informasi Desa (SID) telah dirasakan membantu kerja-kerja administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintah desa ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat yang merasa dipermudah dalam melakukan pengurusan surat-menyurat maupun yang terkait dengan urusan kependudukan mereka.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86.<sup>2</sup> Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan desa membuat Sistem Informasi Desa (SID) menjadi

---

<sup>1</sup> Ranggoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD), 2014), hal. 1-2.

<sup>2</sup> <https://www.panda.id/sistem-informasi-des/> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

penting perannya. Karena itu perlu dikembangkan Sistem Informasi Desa (SID) yang sesuai dengan visi Undang-Undang Desa yakni menjadikan desa kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis. Oleh karenanya Sistem Informasi Desa (SID) diatur khusus dalam Undang-Undang Desa melalui Pasal 86. Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota setidaknya menjawab kebutuhan yang terkait dengan data desa, sehingga desa menjadi bersuara. Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan dapat mempunyai data dan informasi yang berkualitas, komprehensif, dan terintegrasi.<sup>3</sup>

Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID), yaitu:

- a. Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (13 informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll).
- b. Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
- c. Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015), hal. 331.

- d. Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan.
- e. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan.

Ada 4 hal yang mendorong lahirnya Sistem Informasi Desa (SID), yaitu:

- a. Adanya suatu kebutuhan untuk mengamankan dokumen-dokumen desa secara digital, tidak lain langkah yang ditempuh adalah dengan memindahkannya dari kertas menjadi format digital yang tersimpan di dalam komputer.
- b. Adanya suatu kebutuhan untuk mencari data kependudukan dan data desa lainnya secara cepat dan tepat.
- c. Adanya suatu kebutuhan sistem informasi (aplikasi) yang bersifat terbuka (*open source*) dan gratis agar tidak membebani keuangan desa.
- d. Adanya kecenderungan hasil pendataan yang dilakukan berbagai pihak (pemerintah) tidak dibagikan kembali ke desa. Berbagai pihak yang melakukan pendataan tersebut juga menggunakan indikator yang berbeda-beda sehingga data dasar tersebut sulit untuk diolah sebagai kebijakan yang terpadu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ranggoaini Jahja dkk, *Buku Pintar Sistem Administrasi dan Informasi Desa...*, hal. 1-2.

## 2. Prinsip Penerapan Sistem Informasi Desa (SID)

Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:

- a. Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (*open data*);
- c. Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
- d. Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa;
- e. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa;
- f. Standardisasi Data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa;

- g. Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.<sup>5</sup>

### 3. Tujuan Membangun SID

Tujuan dalam membangun Sistem Informasi Desa (SID) di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pemetaan kondisi dan potensi desa (data akurat dan mutakhir)
- b. Untuk memperkuat kualitas pelayanan publik
- c. Untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan kawasan desa.<sup>6</sup>

### 4. Peran Dan Manfaat Aplikasi Sistem Informasi Desa

Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) digunakan untuk membantu kinerja Pemerintah Desa sehingga dapat lebih efisien dalam pengelolaan administrasi dan data desa. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa manfaat Sistem Informasi Desa (SID) menurut pengertian di atas:

- a. Mempercepat pengelolaan data desa

Pengelolaan data desa seperti data kependudukan, sarana dan prasarana, anggaran desa, dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain cepat dan mudah, dengan menggunakan aplikasi SID data desa dapat disimpan dengan aman

---

<sup>5</sup> <http://www.keuangandes.com/2015/05/memahami-sistem-informasi-dalam-konteks-uu-desa/> diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 09.25 WIB.

<sup>6</sup> <https://drive.google.com/file/d/0B7LNzEI-w45qYzdmQzIyUnFYbkU/view> diakses pada hari Kamis, 6 Februari 2020 Pukul 19.08 WIB.

didalam sistem dan lebih mudah dalam pencarian data menggunakan fitur pencarian yang disediakan aplikasi.

b. Mempercepat pelayanan desa

Pelayanan administrasi desa konvensional sangat menyita waktu. Aplikasi SID yang dibangun dengan baik dapat mempercepat waktu pelayanan desa.

c. Memanfaatkan data desa

Desa dapat memanfaatkan data yang terdapat dalam sistem untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, perencanaan dan pembangunan ditingkat kabupaten atau kawasan, serta pengelolaan sumber daya desa secara mandiri oleh komunitas atau warga desa.

d. Transparasi pemerintah desa

Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewajiban transparasi desa dengan memanfaatkan website desa yang terintegrasi dengan aplikasi SID sebagai media keterbukaan informasi desa. Warga juga dapat ikut memantau informasi yang desa umumkan melalui website resmi desa.<sup>7</sup> Dengan SID, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga. Misalnya, kantor desa dapat memakai SID untuk mengelola informasi perencanaan pengembangan desa dan

---

<sup>7</sup> <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa/> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

menampilkan informasi tersebut pada berbagai media, seperti di web desa, papan pengumuman, dan sebagainya.

e. Kantor desa lebih efisien

Misalnya dengan memakai SID, kantor desa dapat menyediakan layanan surat keterangan pada warga jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Dengan SID, data penduduk sudah tersimpan dan dapat diisikan secara otomatis pada surat yang bisa dicetak langsung.

f. Kantor desa lebih efektif

Sebagai contoh, karena SID menyimpan data penduduk beserta atribut-atributnya, kantor desa dapat dengan mudah memilah data penduduk secara akurat berdasarkan kriteria yang diinginkan, sehingga bisa mentargetkan suatu program pemerintah secara tepat sasaran. ini berbeda dengan proses serupa tanpa SID, di mana sering dilakukan penentuan sasaran program secara kira-kira dan tidak berbasis data.

g. Pemerintah Desa lebih akuntabel

Dengan adanya informasi perencanaan, kegiatan pembangunan, penggunaan dana desa dan sebagainya di dalam SID yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel. Kantor desa akan mempunyai kesempatan untuk secara lebih mudah membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan, penggunaan dana desa dan sebagainya.



h. Layanan publik lebih baik

Dengan SID kantor desa akan lebih efisien dan lebih efektif dalam melakukan fungsi dan tugas mereka. Karena salah satu tugas utama kantor desa adalah memberi layanan publik, fungsi ini pun akan lebih baik. Contoh sederhana yang diberikan di atas, warga bisa memperoleh surat keterangan yang mereka butuhkan secara lebih cepat dan dengan data yang lebih akurat.

i. Warga mendapat akses lebih baik pada informasi desa

Dengan SID, informasi kependudukan, perencanaan, asset, anggaran dan sebagainya akan terekam secara elektronik. Semua informasi tersebut mempunyai potensi untuk lebih mudah diakses oleh warga. Kantor desa mempunyai kesempatan untuk menyediakan fasilitas bagi warga untuk mengakses informasi desa dengan mudah, misalnya dengan menerbitkan informasi desa di web desa. Karena tahu dari data itu ada, warga juga mempunyai kesempatan untuk menuntut kantor desa untuk menyediakan akses pada informasi yang mereka butuhkan.

j. Warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa

Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain

terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar atau usulan elektronik<sup>8</sup>

## **B. Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa)**

### **1. Pengertian Hukum**

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>9</sup> Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <https://github.com/opensid/opensid/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa> diakses pada hari Kamis, 26 Maret 2020 pukul 19.30 WIB.

<sup>9</sup> J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 37.

<sup>10</sup> Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 12.

Hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Hukum Sebagai Sosial Kontrol

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat akibatnya seperti larangan, perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

b. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh *Roscoe Pound a tool of social engineering*. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.

Ada empat faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- 2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
- 3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
- 4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

c. Fungsi hukum sebagai simbol

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karena itu simbol pencuri, berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian.

d. Fungsi hukum sebagai alat politik

Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan

merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah.

e. Fungsi hukum sebagai alat integrasi

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.<sup>12</sup> Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>13</sup> Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Konsep hukum positif merupakan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 37-39.

<sup>12</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 127.

<sup>13</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 56.

konsep yang berlawanan dengan konsep yang berlawanan dengan konsep hukum alam. Hukum positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan hukum tersebut mengikat.<sup>14</sup>

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law And State*, (The Lawbook Exchange, 2007), hal. 392.

pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.<sup>15</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa terdapat 6 Ayat:

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

---

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 53.

- c. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Pasal 86 ayat (1) dinyatakan bahwa SID dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Sementara pada ayat (5) disebutkan pengelolaan SID dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanyaan diatas cukup beralasan, karena disatu sisi SID dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Disaat yang lain, Desa juga masih dibebani tanggung jawab untuk mengisi berbagai sistem informasi serupa SID yang masih berlaku, sehingga perlu kita pertimbangkan kesiapan aparatur desa (ketersediaan dan kualifikasi personil) untuk memenuhi tanggung jawab terkait sistem informasi yang harus terus dimutakhirkan (update).



Pasal 86 ayat (4) disebutkan SID yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini meliputi data Desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ayat (2) dan ayat (5) mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemda untuk mengembangkan SID, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dapat diakses oleh masyarakat desa dan pemangku kepentingan lainnya. Ayat (6) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah/pemerintah daerah wajib mengembangkan system informasi dengan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

## **C. Konsep Siyasah Dusturiyah**

### **1. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa

siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>16</sup>

Kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), hal. 3-4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 177.

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh *siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlailah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

### 3. Konsep Siyasah Dusturiyah

Berdasarkan ruang lingkup *fiqh siyasah* peneliti mengkaji masalah berdasarkan fiqh siyasah khususnya dalam *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lainnya.<sup>18</sup>

Dalam *fiqh Siyasah*, konstitusi disebut juga dengan kata dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber sumber dan kaedah perundang undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan dasar pengundangannya,<sup>19</sup> sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Prinsip Hukum yang telah tercantum dalam QS. Al An 'am ayat 57 yang berbunyi:

---

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 46-47.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hal. 153.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ  
 بِهِ ۚ إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقْصُ الْحَقُّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".<sup>20</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah penerapan sistem informasi desa yang dilaksanakan pemerintah desa, Di dalam Alquran banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran (QS al Baqarah: 30):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ  
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), hal. 191.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 9.

Berdasarkan ayat di atas, keterkaitan ayat dengan tema dalam proposal sesuai dengan QS. Al An ‘am ayat 57 dan QS Al Baqarah ayat 30, bahwa hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.<sup>22</sup> Sebagaimana implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus diterapkan, dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan baik. Dengan penerapan Pasal 86 dalam Pemerintah Desa, Sistem Informasi Desa dalam Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Amalia Mukti Sugiharto dengan judul “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 47.

platform Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh Pemerintah Desa untuk menyajikan beragam data dan informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam mementingkan pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan yang dianalisis dengan menyinggung kajian *good governance*, *e-government* serta komunikasi pembangunan.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian diatas adalah, jika penelitian Amalian Mukti Sugiharto dalam skripsinya berfokus pada Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik melalui Sistem Informasi Desa, sedangkan penelitian peneliti berfokus dengan Implementasi Pasal 86 tentang Sistem Informasi Desa Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh R. Muhammad Ridwan Fahrudin dengan judul “Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (Studi Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”. Hasil penelitian menyimpulkan a). Sistem pengawasan dana desa di desa Panggungharjo terdiri dari beberapa jenis, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh internal lembaga diluar dari Pemerintah Desa Panggungharjo oleh Badan Permusyaratan Daerah, Babinkamtibmas, Badan Keswadayaan Masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Masyarakat itu sendiri. b). Desa Panggungharjo sudah melaksanakan nilai-nilai dari Good

---

<sup>23</sup> Amalia Mukti Sugiharto, *Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Desa (Studi Deskriptif Pada Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018) dalam <http://lib.unair.ac.id> diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

Governance, Pengelolaan Sistem Informasi Desa telah dilaksanakan pada Desa Panggungharjo Sejak tahun 2013.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian R. Muhammad Ridwan Fahrudin dalam skripsinya berfokus pada pengawasan dana desa melalui sistem informasi desa, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penerapan sistem informasi desa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Antonius Along dengan judul “Pemanfaat Sistem Informasi Desa Untuk Keterbukaan Informasi Publik (Studi deskriptif kualitatif tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Keterbukaan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Hasil Penelitian menyimpulkan 1). Pemanfaatan Program SID di Desa Dlingo mendorong terjalinnya komunikasi, partisipasi dan demokrasi yang baik, antara Pemerintah Desa Dlingo dengan masyarakat Desa Dlingo. Kedua belah pihak dapat saling memberikan feedback yang dibutuhkan. Dengan pemanfaatan SID Pemerintah Desa Dlingo dapat memberikan pelayanan kependudukan, KIP yang transparan dan akuntabel, dengan maksimal kepada masyarakat Desa Dlingo; 2). Keberadaan SID menjadi tanda perubahan dan pembangunan Pemerintahan Desa Dlingo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemerintah

---

<sup>24</sup> R. Muhammad Ridwan Fahrudin, *Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (Studi Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hal 105-106 dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/30474/1/14340107\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/30474/1/14340107_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 15.24 WIB.



Desa Dlingo dapat mewujudkan KIP dengan baik dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Desa Dlingo. 3). Pelayanan publik, KIP yang transparan dan akuntabel dari Pemerintah Desa Dlingo, sangat dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat Desa Dlingo; dan 4). Dengan pemanfaatan program SID maka Pemerintah Desa Dlingo telah menjalankan amanat UU antara lain : UUD 1945, yaitu pada pasal 28F, UU Desa No. 6/2014 Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan bagian ketiga Sistem Informasi Desa (SID) dan UU. No. 14/2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa manfaat program SID di Desa Dlingo antara lain : (1) untuk perencanaan pembangunan; (2) untuk keterbukaan informasi; (3) untuk pendataan kemiskinan; (4) dan untuk pelayanan publik<sup>25</sup>. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian Antonius Along dalam skripsinya berfokus pada pemanfaatan sistem informasi desa untuk keterbukaan informasi publik, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penerapan sistem informasi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Makelon Selepole dengan judul “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintahan Desa

---

<sup>25</sup> Antonius Along, *Pemanfaat Sistem Informasi Desa Untuk Keterbukaan Informasi Publik (Studi deskriptif kualitatif tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Keterbukaan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), 2016) dalam [http://repo.apmd.ac.id/130/1/332-IK-III-2016-ANTONIUS%20ALONG-13530044\\_B.pdf](http://repo.apmd.ac.id/130/1/332-IK-III-2016-ANTONIUS%20ALONG-13530044_B.pdf) diakses pada hari Kamis, 12 Desember pukul 16.54 WIB.

secara struktural, Kepala Desa selaku pemimpin (leader ship) dapat mengorganisir aparatur pelaksana dibawahnya, yaitu sekretaris desa, kepala seksi, Permusyawaratan desa kepala seksi Badan Pemerintah Desa Kepala seksi umum serta staf administrasi desa dan Kaur Pencanaan dan terkait, dengan mengembangkan kapasitas guna mendistribusikan kewenangannya sesuai bidang tugas dan cakupan wilayah pelayanan yang dimiliki, Namun jika dilihat dari realitas dilapangan, pengelolaan Sistem Informasi Desa belum berjalan secara maksimal karena sistem informasi desa bisa meningkatkan untuk kualitas pengelolaan dilaksanakan melalui internet Pemerintah Desa, melalui pengelolaan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa masih di akomodir oleh Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Desa mengalami kendala dalam pengembangan kapasitas sistem informasi desa.<sup>26</sup> Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian Makelon Selepole dalam skripsinya berfokus pada pengembangan Pemerintah Desa dengan Sistem Informasi Desa, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Hana Amelinda Azalia dengan judul “Implementasi Program Sistem Informasi Desa (Studi Kasus: Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Tahun 2016)”. Hasil penelitian menyimpulkan

---

<sup>26</sup> Makelon Selepole, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2018) dalam <http://repo.apmd.ac.id/564/1/SKRIPSI%202.pdf> diakses pada hari Kamis, 12 Desember 2019 pukul 18.34 WIB.

bagaimana penerapan program sistem informasi desa di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri dan faktor-faktor yang menghambat program sistem informasi desa di Desa Sendang Kecamatan Wonogiri.<sup>27</sup> Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah, apabila penelitian Hana Amelinda Azalia dalam skripsinya berfokus hanya pada penerapan program sistem informasi desa secara umum, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 86 Tentang Sistem Informasi Desa dan ditinjau pula dari siyash dusturiyah.

---

<sup>27</sup> Hana Amelinda Azalia, *Implementasi Program Sistem Informasi Desa (Studi Kasus: Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Tahun 2016)*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017) dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14836/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllo wed=y> diakses pada hari Jumat, 13 Desember 2019 pukul 06.53 WIB.